



# **KECAMATAN PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

**INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI**



**H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650603 198602 1 004**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud kepatuhan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Dalam Negeri.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (**Government By Result Oriented**).



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022*

---

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

**Tebing Tinggi, Januari 2023**

**CAMAT PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si  
NIP. 19810709 200312 1 003**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	3
1.4 Landasan Hukum .....	5
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.1.1 Visi Kepala Daerah .....	7
2.1.2 Misi Kepala Daerah .....	7
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.2 Realisasi Anggaran .....	19
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	21
BAB IV PENUTUP .....	24
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022 diharapkan dapat :

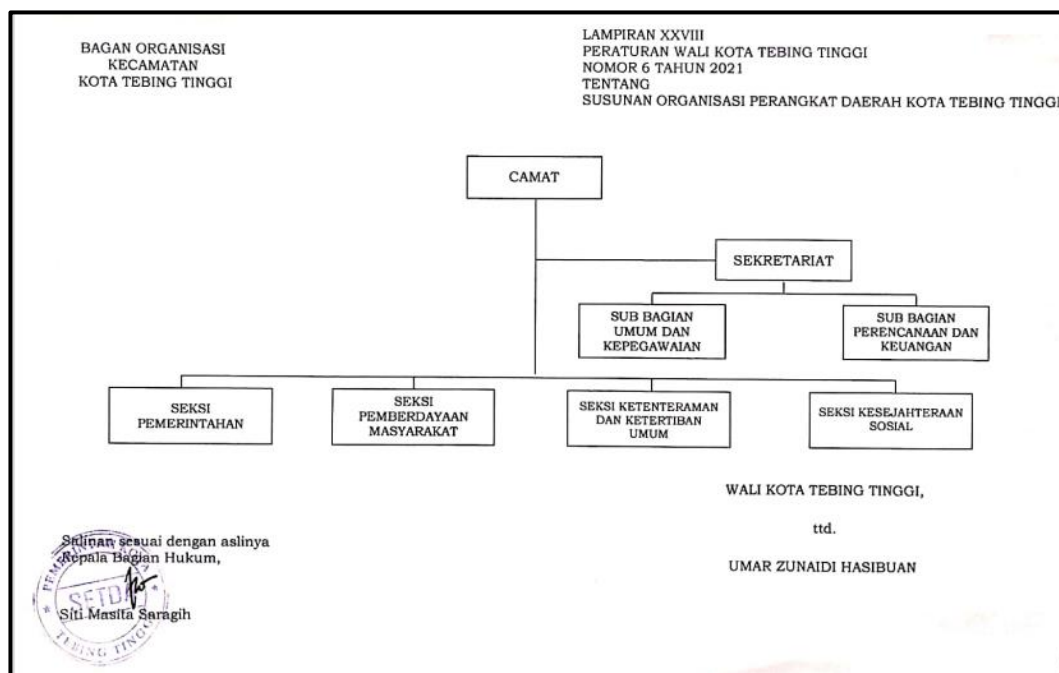
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
2. Mendorong Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Kecamatan Padang Hulu adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Padang Hulu terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Padang Hulu antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### 1.2.1 Keadaan Pegawai

Kecamatan Padang Hulu didukung oleh 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, dimana 9 (sembilan) orang berada di Kantor Camat dan 25 (dua puluh lima) orang tersebar di 7 (tujuh) kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu .

Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari :
  - Perempuan : 19 orang
  - Laki : 15 orang
- b. Berdasarkan Pendidikan
  - Tamat S2 : 1 orang
  - Tamat S1 : 19 orang
  - Tamat D4/D3 : 3 orang
  - Tamat SLTA : 10 orang
  - Tamat SLTP : 1 orang
  - Tamat SD : -
- c. Berdasarkan Golongan
  - Golongan IV/a : 1 orang



Golongan III/d	: 11 orang
Golongan III/c	: 10 orang
Golongan III/b	: 7 orang
Golongan III/a	: 1 orang
Golongan II/d	: 1 orang
Golongan II/c	: 1 orang
Golongan II/b	: 1 orang
Golongan I/d	: 1 orang

d. Berdasarkan formasi jabatan struktural, dari 43 jabatan struktural yang ada, hanya 30 yang terpenuhi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Hulu yang ideal didukung oleh 62 orang pegawai yaitu terdiri dari 43 Pejabat Struktural, dan 19 pejabat fungsional umum. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2022 Kecamatan Padang Hulu secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM.

Dengan kondisi SDM yang ada, Kecamatan Padang Hulu berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun Tenaga Teknis Non PNS untuk mengimbangi beban kerja yang menjadi tugas-tugas Kecamatan Padang Hulu .

### **1.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang administrasi pemerintahan, Kecamatan Padang Hulu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Kecamatan Padang Hulu mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 15 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 34 orang pegawai dan 27 tenaga teknis, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap kegiatan rapat.

### **1.2.3 Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Hulu pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota

Tebing Tinggi. Berdasarkan DPA Induk Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Padang Hulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.358.453.332,-

Kemudian dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dimana Kecamatan Padang Hulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.360.994.856,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran belanja yang berasal dari APBD tersebut terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

### 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan tentunya ada menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tupoksi Kecamatan Padang Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.
- b. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders*  
Dalam mengatasi hal ini maka Kantor Kecamatan TebingTinggi Kota Kota Tebing Tinggi harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Tebing Tinggi seperti masyarakat, SKPD, Sekolah-Sekolah, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas Pelayanan di kantor Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
- c. Belum optimalnya pelayanan dalam bidang Pemerintahan  
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang Pemerintahan, maka sudah tentu Kantor Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat Kota Tebing Tinggi.
- d. Masih kurangnya keahlian dan kompetensi di bidang Pemerintahan

Keberadaan aparatur Pemerintahan baik pada Kantor Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan keahlian dan kompetensi di bidang Pemerintahan.

- e. Persentase usulan kegiatan yang merupakan hasil Musrenbang masih belum semua terakomodir di dalam APBD karena keterbatasan dana.
- f. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Data yang dibutuhkan didalam perencanaan masih belum up to date.

Isu-isu strategis yang muncul di ruang lingkup Pemerintahan tidak terlepas dari masalah yang sedang terjadi atau sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan bakal muncul dalam waktu dekat dan sifatnya mendesak untuk segera diketahui penyebabnya, kemudian dicari berbagai strategi alternatif untuk menghilangkan penyebab dan ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan nyata.

Berdasarkan identifikasi dan evaluasi ditemui ada beberapa isu aktual dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, yaitu :

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Masih rendahnya pemahaman aparatur Kecamatan tentang peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- c. Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Kurangnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan terhadap aparatur Kelurahan;
- e. Rendahnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan umum kepada masyarakat.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Hulu (LKjIP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/729 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.
- k. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 060/16217 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).



## **1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
  - 2.1.1. Visi Kepala Daerah
  - 2.1.2. Misi Kepala Daerah
  - 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

##### 2.1.1 Visi Kepala Daerah

Visi Kota Tebing Tinggi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 adalah ***Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas.***

##### 2.1.2 Misi Kepala Daerah

Misi Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 antara lain :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

##### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota Tebing Tinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Hulu adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani*** dengan sasaran ***Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.***

Adapun indikator sasaran dalam mewujudkan misi tersebut telah dijabarkan didalam Renstra Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang tertuang didalam surat

Keputusan Camat Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Nomor 050/28 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Strategis Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut kami sajikan Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 :

**Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Hulu**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	Persen / Nilai	- / 81,00	- / 82,00	70 / 83	72 / 84	75 / 85

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka untuk tahun 2022 ini, Kecamatan Padang Hulu menargetkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner survei kepuasan masyarakat dalam aplikasi SIKEMAS sebesar 85,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Padang Hulu**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	Persen / Nilai	75 / 85,00

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan adanya Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 yang ditetapkan di bulan November 2022, maka pada tanggal 7 November 2022 Camat Padang Hulu memperbaharui perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan Walikota Tebing Tinggi, dimana perubahan yang mendasar hanya terdapat pada penyesuaian pagu anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2022, dimana sebelumnya anggaran Kecamatan Padang Hulu sebesar Rp. 6.358.453.332,- menjadi Rp. 6.360.994.856,-. Sementara untuk tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kinerjanya masih sama seperti di awal tahun 2022.

Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang diperjanjikan Camat Padang Hulu kepada Walikota Tebing Tinggi sampai akhir tahun 2022.

**Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Padang Hulu**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	Persen / Nilai	75/ 85,00

Pada tahun 2022, Kecamatan Padang Hulu tidak mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator kinerja yang mengatur capaian kinerja Kecamatan Padang Hulu pada Tahun 2022 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Hulu tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022  
Kecamatan Padang Hulu**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	5.347.150.256
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 laporan	15.156.000





*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022*

a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja	12 bulan	15.156.000
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan</i>	12 dokumen	4.217.446.156
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.217.446.156
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan</i>	8 dokumen	16.785.000
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 tahun	16.785.000
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan</i>	5 laporan	535.724.265
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	38.630.000
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	94.529.629
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	171.216.985
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	93.185.100
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	138.162.551
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	4 paket	43.871.300
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2 paket	11.251.300
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket	32.620.000
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 paket	-
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	5 buah	401.890.376
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	49.248.176
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	352.642.200
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</i>	5 kegiatan	116.277.159
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	23.057.159

b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	93.220.000
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	0 kegiatan	-
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>963.529.600</b>
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah jasa yang tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>	5 buah	963.529.600
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Tenaga Pkk Kecamatan Dan Kelurahan, Bilal Mayit Serta Penggali Kubur	12 bulan	963.529.600
		Jumlah Kegiatan Gotong Royong Yang Dilaksanakan	36 Kegiatan	
		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kepala Lingkungan	12 bulan	
<b>III.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>50.315.000</b>
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan</i>	8 kegiatan	50.315.000
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	8 kegiatan	50.315.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Skala nilai peringkat kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil penilaian kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi kriteria penilaian realisasi kinerja, permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan Strategis tahun berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja Kecamatan Padang Hulu**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	<b>91% ≤ 100%</b>	Sangat Tinggi
2	<b>76% ≤ 90%</b>	Tinggi
3	<b>66% ≤ 75%</b>	Sedang
4	<b>51% ≤ 65%</b>	Rendah
5	<b>≤ 50%</b>	Sangat Rendah

Secara umum, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi telah memberikan kontribusi positif pada pencapaian Kinerja Organisasinya. Dari target pada Indikator Sasaran yang ditetapkan, realisasinya mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	75% / 85,00	63,87% / 92,50	85,16% / 108,82%	B / Sangat Tinggi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada unit kerja perangkat daerah / Hasil perhitungan kuesioner survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SIKEMAS

Adapun realisasi capaian indikator tujuan Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022 sebesar 85,16% dengan kategori B yang diperoleh dari hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada unit kerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022.

Sedangkan realisasi capaian indikator sasaran Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022 sebesar 108,82% diperoleh dari hasil pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang diisi secara manual dalam aplikasi SIKEMAS oleh 559 orang dengan rincian jawaban sebagai berikut

**Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat  
Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022  
Dari Aplikasi SIKEMAS**

No	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden
1	Sangat Baik (88,31-100)	352
2	Baik (76,61-88,30)	207
3	Kurang Baik (65,00-76,60)	0
4	Tidak Baik (25,00-64,99)	0
	<b>TOTAL</b>	<b>559</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja Kecamatan Padang Hulu untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hulu Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	70% / 84,00 (Nilai)	70,69% / 91,00 (Nilai)	100,99 / 108,33	75% / 85,00 (Nilai)	63,87% / 92,50 (Nilai)	85,16 / 108,82

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator tujuan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kecamatan Padang Hulu kepada masyarakat. Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan mampu melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk melihat kemajuan dari sasaran strategis Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	63,87% / 92,50 (Nilai)	75% / 85,00 (Nilai)	85,16 % / 108,82 %

Tabel 9 menjelaskan bahwa Kemajuan Capaian sasaran strategis 2022 terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan dan sasaran indikator kinerja yang melebihi target akhir 2022.

**Tabel 10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi Kabupaten/Kota Lain**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standart Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

Pada tabel 10 dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Padang Hulu tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional / provinsi / kabupaten / kota lain karena tidak ada standar yang mengatur untuk menentukan capaian kinerja setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

**Tabel 11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanannya kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	75% / 85,00 (Nilai)	63,87 % / 92,50 (Nilai)	85,16 / 108,82	Gagal / Berhasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melengkapi bukti dukung yang relevan bahwa perubahan telah dilaksanakan;</li> <li>Menyesuaikan bukti dukung dengan pernyataan dan jawaban yang diberikan;</li> <li>Melengkapi bukti dukung dengan lengkap sehingga terlihat gambaran utuh proses manajemen perubahan yang telah dilaksanakan;</li> <li>Memberikan penjelasan pada bagian reform yang didukung dengan dokumen yang relevan;</li> <li>Memberikan penjelasan pada bagian reform dengan jelas dan lengkap, sehingga memberikan keyakinan pada asesor bahwa manajemen</li> </ol>

							<p>perubahan telah dilakukan dengan sebenar-benarnya.</p> <p>/</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Padang Hulu senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dari Bagian Organisasi terkait Monev Pelayanan Publik;</li> <li>2. Meningkatkan penggunaan aplikasi SIKEMAS;</li> <li>3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik;</li> <li>4. Cepat tanggap atas keluhan masyarakat;</li> <li>5. Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan Padang Hulu khususnya dalam pelayanan publik;</li> <li>6. Semua pengurusan masyarakat GRATIS.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 11 menyajikan data analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dari indikator kinerja Kecamatan Padang Hulu untuk tahun 2022. Dimana dari tabel tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Hulu gagal dalam mencapai target kinerja pada tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2022, namun hal itu tidak mengurangi kualitas pelayanan Kecamatan Padang Hulu kepada masyarakat. Selain itu, pada tabel 11 juga dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Hulu berhasil mencapai target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Solusi yang akan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja pada tujuan perangkat daerah antara lain :

1. Melengkapi bukti dukung yang relevan bahwa perubahan telah dilaksanakan;
2. Menyesuaikan bukti dukung dengan pernyataan dan jawaban yang diberikan;
3. Melengkapi bukti dukung dengan lengkap sehingga terlihat gambaran utuh proses manajemen perubahan yang telah dilaksanakan;
4. Memberikan penjelasan pada bagian reform yang didukung dengan dokumen yang relevan;
5. Memberikan penjelasan pada bagian reform dengan jelas dan lengkap, sehingga memberikan keyakinan pada asesor bahwa manajemen perubahan

telah dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Sedangkan faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis antara lain :

1. Kecamatan Padang Hulu senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dari Bagian Organisasi terkait Monev Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan penggunaan aplikasi SIKEMAS;
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik;
4. Cepat tanggap atas keluhan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan Padang Hulu khususnya dalam pelayanan publik;
6. Semua pengurusan masyarakat GRATIS.

**Tabel 12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu / Indeks kepuasan masyarakat	85,16 / 108,82	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 laporan	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja	12 bulan	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 dokumen	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	8 dokumen	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tahun penyediaan pengamanan barang milik daerah SKPD	1 tahun	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan	5 laporan	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi	12 bulan	Menunjang





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

				listrik/penerangan bangunan kantor		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Menunjang
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Menunjang
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Paket	Menunjang
			Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan mebel	2 Paket	Menunjang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	Menunjang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	5 jasa	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah loket pelayanan kantor Lurah yang terbangun	0 unit	Tidak Menunjang
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah jasa yang tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan yang	5 buah	Menunjang

			<p>Keja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p>		
		<p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Tenaga Pkk Kecamatan Dan Kelurahan, Bilal Mayit Serta Penggali Kubur</p>	12 bulan	Menunjang
			<p>Jumlah Kegiatan Gotong Royong Yang Dilaksanakan</p>	36 Kegiatan	
			<p>Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kepala Lingkungan</p>	12 bulan	Menunjang
		<p><b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b></p>	<p><b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana</b></p>	100%	<b>Menunjang</b>
		<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p>	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan</p>	8 kegiatan	Menunjang
		<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p>	<p>Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan</p>	8 kegiatan	Menunjang

Dari tabel 12 diatas, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Hulu untuk tahun 2022 secara langsung ataupun tidak langsung menunjang dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun ada 2 sub kegiatan berupa pengadaan sofa dan Rehabilitas Gedung kantor Camat yang tidak dilaksanakan dan anggarannya difocusing namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian kinerja di Kecamatan Padang Hulu.

Dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Padang Hulu tidak mengalami hambatan yang berarti karena Kecamatan Padang Hulu tetap berpedoman pada sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memaksimalkan potensi yang ada baik anggaran maupun SDM yang tersedia.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 13 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.347.150.256	5.169.027.587	96,67%

1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.156.000	15.156.000	100,00%
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.156.000	15.156.000	100,00%
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.217.446.156	4.042.276.750	95,85%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.446.156	4.042.276.750	95,85%
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	16.785.000	16.785.000	100,00%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.785.000	16.785.000	100,00%
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	535.724.265	535.627.158	99,98%
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	38.630.000	38.627.800	99,99%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.529.629	94.527.900	100,00%
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	171.216.985	171.216.600	100,00%
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	93.185.100	93.184.800	100,00%
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.162.551	138.070.058	99,93%
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	43.871.300	43.810.000	99,86%
a.	Pengadaan Mebel	11.251.300	11.190.000	99,46%
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	32.620.000	32.620.000	100,00%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0%
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	401.890.376	399.599.579	99,43%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	49.248.176	48.151.819	97,77%
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.642.200	351.447.760	99,66%
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	116.277.159	115.773.100	99,57%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.057.159	22.553.100	97,81%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	93.220.000	93.220.000	100,00%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0%
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>963.529.600</b>	<b>812.080.055</b>	<b>84,28%</b>
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	963.529.600	812.080.055	84,28%
a.		963.529.600	812.080.055	84,28%

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
<b>III.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>50.315.000</b>	<b>50.315.000</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.315.000	50.315.000	100,00%
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.315.000	50.315.000	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>6.360.994.856</b>	<b>6.031.422.642</b>	<b>94,82%</b>

Anggaran Kecamatan Padang Hulu di Perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 6.360.994.856,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.031.422.642,- (94,82%) dengan capaian kinerja sebesar 108,82% dan efisiensi anggaran 5,18%.

### 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan / Sasaran / IKU	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	75% / 85,00 (Nilai)	63,87% / 92,50 (Nilai)	85,16 / 108,82	6.360.994.856,-	6.031.422.642,-	94,82	-11,34 / 12,87

Dari tabel 14 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022 sebesar 85,16% sedangkan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis sebesar 108,82% dengan tingkat efisiensi kinerja sebesar 0,99%.

Sedangkan tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.347.150.256</b>	<b>5.169.027.587</b>	<b>96,67</b>	<b>3,33</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15 laporan	15 laporan	100%	15.156.000	15.156.000	100,00	0,00
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	15.156.000	15.156.000	100,00	0,00
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 dokumen	12 dokumen	100%	4.217.446.156	4.042.276.750	95,85	4,15
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	4.217.446.156	4.042.276.750	95,85	4,15
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	8 dokumen	100%	16.785.000	16.785.000	100,00	0,00
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 tahun	1 tahun	100%	16.785.000	16.785.000	100,00	0,00
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	5 laporan	5 laporan	100%	535.724.265	535.627.158	99,98	0,02
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	38.630.000	38.627.800	99,99	0,01
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	94.529.629	94.527.900	100,00	0,002
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100%	171.216.985	171.216.600	100,00	0,0002
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	93.185.100	93.184.800	100,00	0,0003
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	138.162.551	138.070.058	99,93	0,07
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4 paket	4 paket	100%	43.871.300	43.810.000	99,86	0,14
a.	Pengadaan Mebel	2 paket	2 paket	100%	11.251.300	11.190.000	99,46	0,54
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	2 paket	2 paket	100%	32.620.000	32.620.000	100,00	0,00
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 paket	0 paket	0%	0	0	0	0,00
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	5 buah	5 buah	100%	401.890.376	399.599.579	99,43	0,57
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	49.248.176	48.151.819	97,77	2,23
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	352.642.200	351.447.760	99,66	0,34

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	116.277.159	115.773.100	99,57	0,43
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	23.057.159	22.553.100	97,81	2,19
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	93.220.000	93.220.000	100,00	0,00
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>963.529.600</b>	<b>812.080.055</b>	<b>84,28</b>	<b>15,72</b>
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 buah	5 buah	100%	963.529.600	812.080.055	84,28	15,72
a.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan 36 Kegiatan	12 bulan 36 Kegiatan	100% 100%	963.529.600	812.080.055	84,28	15,72
<b>III.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.315.000</b>	<b>50.315.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	50.315.000	50.315.000	100,00	0,00
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	50.315.000	50.315.000	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.360.994.856</b>	<b>6.031.422.642</b>	<b>94,82</b>	<b>12,87</b>

Pada tahun 2022, Kecamatan Padang Hulu membuat suatu inovasi baru yaitu Aplikasi Sistem Digital Elektronik (SIDENI) Buku Tamu Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Proses Buku Tamu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data tamu yang telah mengunjungi Kantor Kecamatan Padang Hulu dan seluruh Kantor Kelurahan se-Kecamatan Padang Hulu. Dimana pada awalnya, Proses Buku Tamu tersebut masih menggunakan proses manual, dimana data-data tamu disimpan di buku tamu sehingga memungkinkan kebingungan dalam mencari data dan bahkan pencarian data membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan kinerja perangkat Kecamatan dan Kelurahan tidak efisien. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan



suatu aplikasi buku tamu yang membantu penyimpanan dan pengolahan data tamu dalam pelayanan pada Kantor Kecamatan Padang Hulu yang diharapkan dapat memproses data tamu lebih efektif dan efisien.

Aplikasi Sistem Digital Elektronik (SIDENI) Buku Tamu Kecamatan Padang Hulu merupakan pendukung dalam melaksanakan pelayanan prima di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Padang Hulu tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani” dengan indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Padang Hulu”, capaian indikator kinerja Kecamatan Padang Hulu sebesar 85,16%.
2. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan”, dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”, capaian indikator kinerja Kecamatan Padang Hulu sebesar 108,82%.
3. Capaian indikator kinerja pada tujuan perangkat daerah Kecamatan Padang Hulu belum melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 85,16%, dengan efisiensi kinerja sebesar -11,34%.
4. Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Kecamatan Padang Hulu telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 108,82%, dengan efisiensi kinerja sebesar 12,87%.

Solusi yang dilakukan terhadap capaian indikator kinerja pada tujuan perangkat daerah antara lain :

1. Melengkapi bukti dukung yang relevan bahwa perubahan telah dilaksanakan;
2. Menyesuaikan bukti dukung dengan pernyataan dan jawaban yang diberikan;
3. Melengkapi bukti dukung dengan lengkap sehingga terlihat gambaran utuh proses manajemen perubahan yang telah dilaksanakan;
4. Memberikan penjelasan pada bagian reform yang didukung dengan dokumen yang relevan;
5. Memberikan penjelasan pada bagian reform dengan jelas dan lengkap, sehingga memberikan keyakinan pada asesor bahwa manajemen perubahan telah dilakukan dengan sebenar-benarnya.



Sedangkan faktor pendorong keberhasilan Kecamatan Padang Hulu dalam mencapai sasaran kinerja tersebut diatas antara lain :

1. Tersedianya ASN yang memberikan pelayanan yang baik dan ramah
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
3. ASN mampu melayani dengan cepat dan tepat
4. Semua pengurusan masyarakat GRATIS

Di masa mendatang, tantangan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan semakin besar. Oleh karena itu, seluruh Aparatur di Kecamatan Padang Hulu harus senantiasa meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya karena telah didukung dengan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai agar capaian sasaran kinerja di tahun 2022 ini dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**CAMAT PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**  
NIP. 19810709 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**KECAMATAN PADANG HULU**  
JLN. JEND. GATOT SUBROTO KM. 05 TELP. 23666 TEBING TINGGI (20622)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE., M.Si  
Jabatan : CAMAT PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP  
Jabatan : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 4 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP



H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85 (Nilai)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,347,150,256
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 963,529,600
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 50,315,000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 6,360,994,856</b>

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP**



**H. DENI HANDIKA SREGAR, SE., M.Si**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAIRUDDIN, SH  
Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE., M.Si  
Jabatan : CAMAT PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE., M.Si**

Pihak Pertama,

**KHAIRUDDIN, SH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG YANG TERLAKSANA	100 (PERSEN)

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 15,156,000
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 4,217,446,156
3.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Rp. 16,785,000
4.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp. 535,724,265
5.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 43,871,300
6.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 401,890,376
7.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 116,277,159
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 5,347,150,256</b>



Pihak Kedua,

*[Handwritten Signature]*

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE., M.Si**

Pihak Pertama,

*[Handwritten Signature]*

**KHAIRUDDIN, SH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITAYANTI, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si  
Jabatan : KEPALA KECAMATAN PADANG HULU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Itayanti".

**ITAYANTI, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERLAKSANANYA PEMBAYARAN JASA TENAGA PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN, BILAL MAYIT SERTA PENGGALI KUBUR	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN JASA TENAGA PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN, BILAL MAYIT SERTA PENGGALI KUBUR	12 (BULAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Rp. 397,689,600
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 397,689,600</b>

Pihak Kedua,



*[Handwritten signature]*

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

*[Handwritten signature]*

**ITAYANTI, SE**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIDIA FARITA PURBA  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si  
Jabatan : KEPALA KECAMATAN PADANG HULU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

**LIDIA FARITA PURBA**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERLAKSANANYA KEGIATAN GOTONG ROYONG KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH KEGIATAN GOTONG ROYONG YANG DILAKSANAKAN	36 (KEGIATAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Rp. 51,040,000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 51,040,000</b>



Pihak Kedua,

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

**LIDIA FARITA PURBA**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FINDANEN ADY SASTRO, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA KECAMATAN PADANG HULU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sastro", written over a horizontal line.

**FINDANEN ADY SASTRO, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERLAKSANANYA PEMBAYARAN JASA KEPALA LINGKUNGAN	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN JASA KEPALA LINGKUNGAN	12 (BULAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Rp. 514,800,000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 514,800,000</b>



Pihak Kedua,

*Handika*  
H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si

Pihak Pertama,

*Sastro*  
FINDANEN ADY SASTRO, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITAYANTI, SE

Jabatan : KEPALA PLT. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA KECAMATAN PADANG HULU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

**ITAYANTI, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERLAKSANANYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	JUMLAH KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	8 (KEGIATAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	Rp. 50,315,000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 50,315,000</b>



Pihak Kedua,

**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

**ITAYANTI, SE**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSNITA, A.Md

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAIRUDDIN, SH

Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
KHAIRUDDIN, SH

Pihak Pertama,

  
YUSNITA, A.Md

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	TERLAKSANANYA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH KECAMATAN	JUMLAH TAHUN PENYEDIAAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1 (TAHUN)
2.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH BULAN KETERSEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12 (BULAN)
3.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12 (BULAN)
4.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12 (BULAN)
5.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12 (BULAN)
6.	TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN DANA UNTUK RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12 (BULAN)
7.	TERLAKSANANYA PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PENGADAAN MEBEL	2 (PAKET)
8.	TERLAKSANANYA PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2 (PAKET)
9.	TERLAKSANANYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0 (PAKET)
10.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 (BULAN)
11.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12 (BULAN)
12.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12 (BULAN)
13.	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12 (BULAN)
14.	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN	0 (KEGIATAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Rp. 16,785,000
2.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 38,630,000
3.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 94,529,629
4.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp. 171,216,985
5.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Rp. 93,185,100
6.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 138,162,551
7.	PENGADAAN MEBEL	Rp. 11,251,300
8.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 32,620,000
9.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp. 0
10.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 49,248,176
11.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 352,642,200
12.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 23,057,159
13.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 93,220,000
14.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 0
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1,114,548,100</b>

Pihak Kedua,



**KHAIRUDDIN, SH**

Pihak Pertama,



**YUSNITA, A.Md**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEISA DUCE, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAIRUDDIN, SH

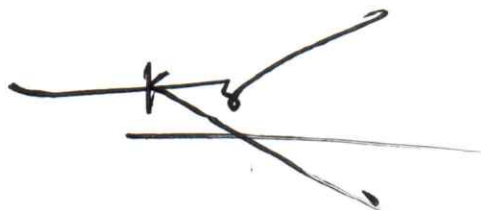
Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**KHAIRUDDIN, SH**

Pihak Pertama,



**MEISA DUCE, SH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH BULAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	12 (BULAN)
2.	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12 (BULAN)

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp. 15,156,000
2.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 4,217,446,156
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 4,232,602,156</b>

Pihak Kedua,

  
**KHAIRUDDIN, SH**

Pihak Pertama,

  
**MEISA DUCE, SH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MINDA ASTUTI

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEISA DUCE, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**MEISA DUCE, SH**

Pihak Pertama,



**MINDA ASTUTI**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	JUMLAH BERKAS PERMINTAAN UANG PERSEDIAAN	Jumlah berkas permintaan uang persediaan dalam satu tahun	1 (Dokumen)
2.	JUMLAH SPP YANG DIAJUKAN	Jumlah SPP yang diajukan dalam setahun	100 (Dokumen)
3.	JUMLAH SURAT PERINTAH PEMBAYARAN UANG SPM GIRO	Jumlah Surat Perintah pembayaran uang SPM giro dalam setahun	50 (Dokumen)
4.	JUMLAH TAGIHAN RUTIN HARIAN KANTOR YANG DISELESAIKAN	Jumlah tagihan rutin yang dibayar dibagi dengan anggaran yang tersedia	86 (Kegiatan)
5.	JUMLAH TAGIHAN YANG DIBAYARKAN	Jumlah tagihan yang dibayar dibagi dengan anggaran yang tersedia	48 (Kegiatan)
6.	JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	Laporan pertanggungjawaban yang dapat diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu 1 tahun	12 (Laporan)
7.	JUMLAH PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN	Jumlah bulan penyetoran pajak yang dilakukan	12 (Bulan)
8.	JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS	Laporan pertanggungjawaban kas yang diselesaikan dalam setahun	12 (Laporan)
9.	JUMLAH LAPORAN PENYETORAN SISA KAS AKHIR TAHUN	Laporan Penyetoran Sisa Kas Akhir Tahun	1 (Laporan)

Pihak Kedua,



**MEISA DUCE, SH**

Pihak Pertama,



**MINDA ASTUTI**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : USLAN TARIGAN

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUSNITA, A.Md

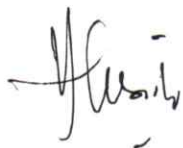
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

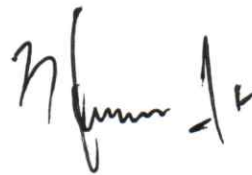
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**YUSNITA, A.Md**

Pihak Pertama,



**USLAN TARIGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PADANG HULU  
KOTA TEBING TINGGI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	JUMLAH LAPORAN RENJA	Laporan rencana kerja Sub Bagian umum dan Kepegawaian	1 (Laporan)
2.	JUMLAH KEGIATAN PADA BUKU INDUK	Laporan Kegiatan pada Buku Induk	1 (Laporan)
3.	JUMLAH DOKUMEN PADA DUK	Dokumen pada DUK	2 (Dokumen)
4.	JUMLAH DOKUMEN KEBUTUHAN PEGAWAI	Laporan dokumen kebutuhan Pegawai	3 (Laporan)
5.	JUMLAH PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT	Jumlah dokumen pengusulan kenaikan pangkat	20 (Dokumen)
6.	JUMLAH PENGUSULAN KENAIKAN BERKALA	jumlah dokumen pengusulan kenaikan berkala	20 (Dokumen)
7.	JUMLAH DOKUMEN KP-4	Jumlah Dokumen KP-4 yang dibuat	50 (Dokumen)

Pihak Kedua,



**YUSNITA, A.Md**

Pihak Pertama,



**USLAN TARIGAN**